

DAENDELS DAN JALAN ANYER-PANARUKAN: JEJAK PENJAJAHAN PRANCIS DI INDONESIA

Rosmaida Sinaga¹, Enjel Adriani br Gurusinga², Jesica Anasstasia Lumbanraja³,
Karel Cornelius Sinaga⁴, Ulfa Rahma Daulay⁵

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Rosmaidasinaga@unimed.ac.id¹, enjelgurusinga@gmail.com²,
[jesicalumbanraja891@gmail.com](mailto:jesimalumbanraja891@gmail.com)³, karelcornelius97@gmail.com⁴,
ulfa73033@gmail.com⁵

ABSTRACT

This article examines the policies of Herman Willem Daendels, Governor-General of the Dutch East Indies (1808–1811), in the construction of the Anyer–Pasarukin Post Road. This approximately 1,000 km road was built as a defense strategy against British threats and to streamline communication and transportation on the island of Java. The construction of this highway had positive impacts in the form of opening up access to mobility, trade, and modern transportation networks. However, behind this, the project caused suffering for the people due to the use of forced labor (rodi), which claimed many lives. This article uses a literature study method by examining various written sources to examine the impact of Daendels' policies from political, military, economic, and social perspectives. The results of the study show that Daendels' policies were ambivalent: on the one hand, strengthening colonial infrastructure and governance, but on the other hand reflecting exploitative practices that oppressed the indigenous people.

Keywords: *Daendels, Anyer–Pasarukin Road, colonialism, forced labor, Indonesian history.*

ABSTRAK

Artikel ini membahas kebijakan Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1808–1811), dalam pembangunan Jalan Raya Pos Anyer–Pasarukin. Jalan sepanjang ±1000 km ini dibangun sebagai strategi pertahanan menghadapi ancaman Inggris serta memperlancar komunikasi dan transportasi di Pulau Jawa. Pembangunan jalan raya ini membawa dampak positif berupa terbukanya akses mobilitas, perdagangan, dan jaringan transportasi modern. Namun, di balik itu, proyek tersebut menimbulkan penderitaan rakyat akibat penggunaan kerja paksa (rodi) yang menelan banyak korban jiwa. Artikel ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah berbagai sumber tertulis untuk mengkaji dampak kebijakan Daendels dari perspektif politik, militer, ekonomi, dan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan Daendels bersifat ambivalen: di satu sisi memperkuat infrastruktur dan pemerintahan kolonial, namun di sisi lain mencerminkan praktik eksploitasi yang menindas masyarakat pribumi.

Kata Kunci: *Daendels, Jalan Anyer–Pasarukin, kolonialisme, kerja paksa, sejarah Indonesia*

A. Pendahuluan

Sejarah penjajahan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran tokoh-tokoh penting yang pernah memimpin dan menerapkan kebijakan kolonial. Salah satu di antaranya adalah Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang memerintah pada tahun 1808–1811. Daendels diangkat oleh pemerintah Belanda untuk memperkuat kedudukan kolonial, khususnya menghadapi ancaman Inggris yang pada masa itu sedang gencar memperluas kekuasaan di Asia. Dalam masa pemerintahannya yang relatif singkat, Daendels meninggalkan jejak kebijakan yang kontroversial sekaligus monumental, salah satunya adalah pembangunan jalan raya Anyer–Panarukan.

Jalan raya yang membentang sepanjang kurang lebih 1.000 kilometer di pesisir utara Pulau Jawa ini dikenal sebagai proyek infrastruktur terbesar pada masanya. Tujuan utama pembangunannya adalah memperlancar mobilisasi pasukan dan logistik kolonial, serta memperkuat kontrol pemerintahan Belanda terhadap wilayah jajahannya. Namun di balik tujuan strategis

tersebut, pembangunan jalan ini meninggalkan penderitaan besar bagi rakyat, karena pengerjaannya dilakukan dengan sistem kerja paksa (rodi) yang menelan banyak korban jiwa.

Seiring berjalannya waktu, Jalan Anyer–Panarukan tidak hanya dipandang dari sudut militer dan politik, tetapi juga dari perspektif ekonomi, sosial, budaya, hingga simbol perlawanan terhadap penindasan kolonial. Di satu sisi, jalan ini mempercepat arus perdagangan dan komunikasi di Pulau Jawa, namun di sisi lain ia menjadi saksi bisu eksploitasi dan penderitaan rakyat. Oleh karena itu, menelaah pembangunan Jalan Anyer–Panarukan dari berbagai perspektif menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan kolonial membentuk dinamika sejarah bangsa Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Studi Literatur. Studi literatur adalah metode pengumpulan data sekunder yang berfokus pada penelaahan, pengumpulan, dan analisis berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel

jurnal, dan penelitian sebelumnya untuk mendapatkan landasan teori dan informasi yang relevan dengan suatu topik atau masalah penelitian. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman mendalam tentang suatu fenomena, menemukan teori yang mendasari, dan membantu merumuskan masalah atau hipotesis dalam penelitian lebih lanjut.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan Ikhtisar keberadaan Prancis di Indonesia

Kedatangan bangsa Perancis ke Indonesia bermula dari Pada awal abad ke-19, situasi politik Eropa didominasi oleh pengaruh Napoleon Bonaparte. Belanda, yang sebelumnya berdaulat penuh, jatuh ke bawah kendali Prancis setelah Louis Napoleon, saudara Napoleon Bonaparte, diangkat sebagai Raja Belanda. Dengan demikian, wilayah jajahan Belanda di Asia, termasuk Hindia Belanda, secara tidak langsung berada di bawah kekuasaan Prancis. Untuk memperkuat posisi kolonial dan menghadapi ancaman Inggris yang saat itu menguasai lautan, Louis Napoleon menunjuk Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1807.

Perjalanan Daendels menuju Nusantara penuh tantangan. Inggris telah melakukan blokade laut untuk menghalangi pergerakan pejabat dan armada Prancis. Untuk menghindarinya, Daendels menempuh jalur panjang: dari Paris menuju Cadiz (Spanyol), lalu ke Maroko, Kepulauan Canary, hingga New York, bahkan menggunakan identitas samaran dengan nama istrinya agar tidak dikenali. Setelah perjalanan panjang sekitar sepuluh bulan, ia tiba di Anyer, Banten, pada 1 Januari 1808, lalu melanjutkan perjalanan ke Batavia. Pada 14 Januari 1808, Daendels resmi dilantik sebagai Gubernur Jenderal dengan restu Napoleon Bonaparte.

Sebagai seorang pengagum Napoleon, kebijakan Daendels bercorak sentralistik, militeristik, dan modernis. Ia menjadikan Batavia sebagai pusat kekuasaan dan membagi Pulau Jawa menjadi 23 karisidenan untuk memperkuat administrasi sekaligus mengurangi pengaruh kerajaan-kerajaan tradisional. Daendels juga segera melaksanakan proyek besar yang terkenal, yaitu pembangunan Jalan Raya Pos Anyer–Panarukan

sepanjang lebih dari 1.000 km. Jalan ini dirancang sebagai jalur strategis pertahanan dan komunikasi untuk memudahkan pergerakan pasukan dalam menghadapi serangan Inggris.

Selain jalan raya, Daendels memperkuat benteng pertahanan, antara lain Benteng Ancol, Weltevreden, dan Meester Cornelis di Batavia, serta benteng di Gresik, Anyer, dan Yogyakarta. Pertahanan Batavia dibuat berlapis, dengan Meester Cornelis sebagai benteng terakhir yang paling kokoh. Di sisi lain, ia juga mendirikan barak militer, rumah sakit, serta pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Dalam bidang militer, ia membentuk pasukan baru, termasuk Legiun Mangkunegaran, yang dilatih ala Grande Armée Napoleon, sehingga Jawa memiliki kekuatan militer modern yang cukup besar pada masa itu.

Dalam bidang administrasi, Daendels berupaya mengurangi korupsi dengan cara mengubah status para bupati dari penguasa tradisional menjadi pegawai bergaji pemerintah kolonial. Namun, kebijakan ini tidak sepenuhnya berhasil. Pembangunan infrastruktur, khususnya Jalan Raya

Pos, justru membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan. Tenaga kerja dipaksa bekerja tanpa upah layak, bahkan sering tidak dibayar sama sekali. Banyak rakyat sengsara, menderita, bahkan meninggal akibat kerja paksa dan kondisi yang tidak manusiawi.

Dengan demikian, kedatangan Prancis ke Indonesia melalui figur Daendels bukanlah penjajahan langsung, melainkan pengaruh politik Prancis melalui Belanda yang berada di bawah kendali Napoleon. Kehadiran Daendels membawa modernisasi penting berupa infrastruktur, sentralisasi pemerintahan, dan penguatan militer, tetapi meninggalkan warisan pahit berupa eksploitasi rakyat. Periode ini menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan kolonial sering kali bersifat ambivalen: di satu sisi mendorong pembangunan, namun di sisi lain menyebabkan penderitaan mendalam bagi masyarakat lokal.

Jejak Penjahahan dan Pemerintahan Daendels

Herman Willem Daendels menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808–1811. Ia terkenal dengan kebijakan

besarnya, yaitu pembangunan Jalan Raya Pos dari Anyer di Banten hingga Panarukan di Jawa Timur sepanjang kurang lebih 1.000 kilometer. Jalan ini dibangun untuk memperkuat pertahanan menghadapi serangan Inggris, memperlancar komunikasi antarwilayah, serta mempercepat distribusi hasil bumi. Akan tetapi, pelaksanaannya dilakukan dengan sistem kerja paksa (rodi) yang melibatkan rakyat pribumi tanpa upah yang layak. Hal ini menyebabkan banyak penderitaan, bahkan korban jiwa akibat kelelahan, kelaparan, dan penyakit. Meski demikian, jalan ini kelak menjadi infrastruktur penting yang memperlancar transportasi dan perdagangan di Jawa.

Selain membangun Jalan Raya Pos, Daendels juga memperkuat pertahanan militer dengan mendirikan benteng-benteng, gudang senjata, dan barak tentara, serta memperkuat pasukan darat maupun laut. Ia memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia yang dianggap rawan penyakit ke Weltevreden (sekarang sekitar Lapangan Banteng, Jakarta). Di bidang pemerintahan, Daendels melakukan reformasi birokrasi dengan mengurangi kekuasaan para bupati

dan menjadikan mereka sebagai pegawai pemerintah kolonial bergaji tetap agar kekuasaan lebih terpusat di tangan pemerintah Belanda. Di bidang ekonomi, Daendels memperkenalkan sistem pajak tanah atau landrent, di mana rakyat wajib membayar pajak hasil bumi kepada pemerintah kolonial. Ia juga menghapus sebagian monopoli VOC yang tidak efisien, meskipun tetap mewajibkan rakyat menyerahkan hasil panennya untuk kepentingan Belanda. Dalam bidang hukum, Daendels mendirikan Pengadilan Tinggi (Hooggerechtshof) di Batavia untuk memperkuat sistem hukum kolonial, serta menerapkan aturan ketat terhadap perdagangan budak walaupun praktiknya masih berlangsung.

Dengan demikian, kebijakan Daendels mencakup pembangunan infrastruktur (seperti Jalan Raya Pos), penguatan pertahanan militer, pemindahan pusat pemerintahan, reformasi birokrasi, penerapan pajak tanah, penggunaan kerja paksa, serta pembaruan hukum. Semua kebijakan ini memiliki dua sisi: di satu pihak memperkuat kekuasaan dan infrastruktur kolonial, namun di pihak lain menimbulkan penderitaan besar

bagi rakyat pribumi karena sifatnya yang menindas dan eksploitatif.

**Kebijakan Daendels:
Pembangunan Jalan Anyer
Panarukan**

Jenderal pada 14 Januari 1808, Daendels langsung memulai proyek pertahanan Jawa dengan membangun jalan raya yang menghubungkan ujung barat dan timur pulau. Selain itu, ia juga membangun dua pangkalan armada laut di Teluk Meeuwen (Ujung Kulon) dan Ujung Manari (Gresik). Daendels menargetkan pembangunan jalan raya ini selesai dalam waktu satu tahun. Pembangunan jalan dimulai dari rute Anyer-Batavia, dengan fokus pada perbaikan dan pelebaran jalan yang sudah ada. Waktu tempuh yang awalnya empat hari berhasil dipersingkat menjadi satu hari setelah jalan diperkeras dan dilebarkan. Daendels memilih Anyer sebagai titik awal karena wilayah ini merupakan salah satu pelabuhan tersibuk dan terbesar di Jawa, sehingga berpotensi menjadi titik pendaratan Inggris. Jalan raya ini diharapkan dapat mempercepat mobilitas pasukan untuk menangkal serangan Inggris. Pembangunan jalan dilanjutkan dari

Batavia ke Buitenzorg, Priangan, dan Karangsembung, yang dibiayai oleh pemerintah.

Namun, dari Karangsembung hingga Surabaya, pembangunan diserahkan kepada para Bupati karena keterbatasan anggaran pemerintah. Keputusan ini diambil setelah Daendels bertemu dengan para Bupati di Semarang pada bulan Juli 1808. Jalan raya pos ini, yang dikenal sebagai Groote Postweg atau Grand Route de la Poste, memiliki pos-pos pergantian kuda setiap lima paal (1 paal = 1,6 km), mirip dengan layanan Pony Express di Amerika Serikat. Jalan raya ini menjadi cetak biru Pulau Jawa modern, dengan pusat-pusat industri tumbuh di sepanjang jalur tersebut.

E. Kesimpulan

Pembangunan jalan Anyer–Panarukan oleh Gubernur Jenderal Daendels merupakan salah satu proyek infrastruktur terbesar di masa kolonial yang meninggalkan jejak penting dalam sejarah Indonesia. Tujuan utama dari pembangunan jalan ini adalah memperkuat pertahanan Belanda di Jawa, khususnya untuk menghadapi ancaman serangan Inggris, sekaligus

memperlancar komunikasi dan transportasi antardaerah. Jalan sepanjang kurang lebih 1000 km ini terbukti memberi dampak positif, karena membuka akses mobilitas orang, barang, dan informasi di Pulau Jawa, bahkan menjadi dasar perkembangan jaringan transportasi modern di kemudian hari. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat sisi gelap yang tidak bisa diabaikan, yaitu cara pembangunan yang menggunakan kerja paksa (rodi) terhadap rakyat pribumi. Banyak masyarakat dipaksa bekerja tanpa upah, mengalami kelaparan, penderitaan fisik, bahkan hingga kehilangan nyawa. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Daendels lebih berorientasi pada kepentingan kolonial daripada kesejahteraan rakyat, sehingga meski berhasil secara fisik, proyek ini meninggalkan trauma sosial yang mendalam bagi penduduk Jawa pada masa itu.

Dari pengalaman sejarah tersebut, dapat diambil pelajaran bahwa pembangunan infrastruktur hendaknya dilakukan dengan mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan rakyat, bukan hanya

kepentingan politik atau militer penguasa. Semangat Daendels dalam membangun infrastruktur berskala besar memang patut dicontoh, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan prinsip keadilan, kemanusiaan, serta partisipasi masyarakat. Selain itu, jalan Anyer–Panarukan sebagai warisan sejarah bangsa perlu dijaga dan dilestarikan, bukan hanya sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai media edukasi dan pariwisata. Dengan demikian, generasi mendatang dapat menghargai sejarah serta menjadikannya refleksi agar pembangunan di masa kini dan masa depan benar-benar membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Sinaga, Rosmaida, dkk., (2020). *Kolonialisme Belanda dan Multikulturalisme Masyarakat Kota Medan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Arifin, Faizal, 2021. Hegemoni Kolonialisme Terhadap Kekuasaan di Nusantara: Strategi Politik Daendels Meruntuhkan Kesultanan Banten Tahun 1808-1811. *JURNAL AGASTYA VOL 11 NO 1, 1-18*
- Harahap, Nur Salsabilah, Sumbayak, Djumar Yorendi, dan Ramadhani, Nurdilla, 2024. Analisis Dampak Kebijakan Daendels Terhadap Masyarakat Indonesia. *AR RUMMAN - Journal of Education and Learning Evaluation, Vol. 1 No. 2, 560-564*

Jaelani, Gani Ahmad, 2022. Penjelajahan Orang Prancis dan Penelitian Sejarah Alam di Nusantara Akhir Abad XVIII dan Awal Abad XIX. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 7 (1), 13-25

Kurniawan, Aries, dan Samodro, 2022. SEJARAH MASA PEMERINTAHAN GUBERNUR JENDERAL H.W. DAENDELS DAN JAN WILLEM JANSSENS DI PULAU JAWA 1808-1811M. *JURNAL ADAT-Jurnal Seni, Desain & Budaya Dewan Kesenian Tangerang Selatan Volume 4. Nomor 2*, 1-16

Harahap, Nur Salsabilah, Sumbayak, Djumar Yorendi, dan Ramadhani, Nurdilla, 2024. Analisis Dampak Kebijakan Daendels Terhadap Masyarakat Indonesia. *AR RUMMAN - Journal of Education and Learning Evaluation, Vol. 1 No. 2*, 560-564

Pramartha, I Nyoman Bayu, dan Pratiwi, Ni Putu Yuniarika, 2025. *PENGARUH REVOLUSI PERANCIS TERHADAP NASIONALISME INDONESIA PADA MASA PERGERAKAN NASIONAL. Jurnal Sangkala Vol (4) No (1)*, 1-10

Pulungan, Dona, dkk., 2025. JALAN RAYA POS (ANYER-PANARUKAN) SEBAGAI BUKTI DARI KEBIJAKAN DAENDELS YANG MASIH ADA HINGGA SEKARANG. PUTERI HIJAU: *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 10(1), 24-31

Saidi, Acep Iwan, 2010. *JALAN RAYA SEBAGAI DESAIN KEBUDAYAAN. Jurnal Sositologi Edisi 19 Tahun 9*

Syaefudin, Mohamad, dkk., 2020. SEJARAH PRANCIS *Pergulatan Peradaban Benua Biru. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru*